

Penertiban Berlanjut

RENGGA YULIANDRA, Batam Kota

PENERTIBAN bangunan liar yang berada di row jalan sepanjang Simpang Kuda, Seipanas menuju Bengkong Seken terus dilakukan. Setelah sebelumnya 87 bangunan liar di sisi kiri jalan ditertibkan, maka pada Rabu (28/3) hari ini giliran 56 bangunan liar sisi kanan ditertibkan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari rencana Pemko Batam untuk melebarkan jalan di kawasan tersebut.

"Besok kita bersihkan sisi kanan jalan," kata Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP

Batam Imam Tohari, kemarin.

Imam mengapresiasi pemilik bangunan karena telah membongkar sendiri bangunannya. "56 bangunan sudah dibongkar sendiri. Kami hanya bersihkan saja," tuturnya. Selain 56 bangunan, penertiban juga akan dilakukan untuk 11 kios permanen di sana. "Tapi kita lihat dulu PL-nya. Kalau mereka ada PL, tentu kami harus sediakan lahan," jelas Imam.

Anggota Komisi I DPRD Batam Musofa mengatakan, bila melihat kemacetan di jalan tersebut saat ini, sudah seharusnya pelebaran jalan di Seipanas dilakukan. Namun de-

mikian, harus ada solusi dan upaya pemberdayaan dari pemerintah, agar usaha para pedagang tidak terhenti. "Harapan saya pemko menyediakan tempat bagi mereka," kata Musofa. Sementara itu, anggota DPRD Batam lainnya, Riky Indrakari melihat, penertiban sejatinya mengacu pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima.

"Harusnya penertiban lintas sektor, ada dinas UKM, Satpol PP dan dinas terkait lainnya. Sehingga ada solusi dari pemerintah," kata Riky.***

Peserta BPJS Harus Dapat Pelayanan Sama

Bisa Langsung ke RS Tipe C dengan Syarat

BATAM KOTA (BP) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan tidak ada perbedaan layanan kesehatan antara sesama peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKS-KIS). Setiap peserta mendapat hak sama, perbedaannya hanya pada kelas yang diambil tiap peserta.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Irfan Racmadi menjelaskan hak setiap peserta JKN-KIS sama. Dimana mereka bisa mendapat perawatan di fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit mana saja. Tergantung dari tempat tinggal dan rujukan yang diberikan oleh faskes.

"Hak setiap peserta sama saja, tak ada bedanya. Kecuali untuk kelas perawatan,

tergantung dari yang diambil peserta," tegas Irfan kepada *Batam Pos*, kemarin.

Ada tahapan yang harus diikuti setiap peserta JKN-KIS untuk mendapat pelayanan. Dimana pelayanan pertama untuk pelayanan harus melalui faskes 1 (klinik dan pukesmas). Jika kondisi pasien tak bisa ditangani di faskes 1, maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit tipe C.

"Kalau ternyata di rumah sakit tipe C, pasien tetap tak bisa ditangani, maka bisa dirujuk ke rumah sakit tipe B. Jadi bertahap sebelum sampai ke rumah sakit tipe B," ujarnya.

Di sisi lain, Irfan tak membantah adanya peserta JKN-KIS yang bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B tanpa melewati rumah sakit tipe C. Rujukan itu pun didapat dari dokter di faskes 1, bukan atas permintaan

peserta. "Peserta tak boleh meminta langsung dirujuk ke rumah sakit tipe C. Dokterlah yang memberikan rujukan atas beberapa pertimbangan. Kecuali darurat," jelasnya.

Menurut dia, ada tiga alasan atau pertimbangan peserta JKN-KIS bisa langsung dapat pelayanan di rumah sakit tipe B tanpa harus dirujuk dulu ke rumah sakit tipe C. Alasan pertama karena kondisi emergency atau darurat, kedua karena domisili peserta JKN-KIS lebih dekat dengan rumah sakit tipe B, ketiga karena tak adanya fasilitas pelayanan yang dibutuhkan peserta di rumah sakit tipe C.

"Letak geografis ini jadi pertimbangan. Pasien bisa dapat tipe B karena rumah mereka lebih dekat daripada rumah sakit tipe C. Apalagi jika kondisi pasien

sudah parah," kata Irfan lagi.

Diketahui di Batam ada empat rumah sakit tipe B, di antaranya Rumah Sakit Awal Bros (RSAB), Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RS-BP) Batam, Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah di Batuaji.

Sedangkan untuk rumah sakit bertipe C di antaranya RS Camatha Sahidya, RS Harapan Bunda, RSIA Mutiara Aini, RS St. Elizabeth Batam, RS Charis Medika, RS Graha Hermine, RS St. Elizabeth Batam Kota, RSIA Frisdhy Angel, dan lainnya.

Sementara untuk faskes 1 di antaranya Klinik Utama Dunia Medical, Klinik Utama Sano Medika, Klinik Utama St. Elizabeth Seilekop, Klinik Utama HCM, Klinik Utama Mediplus hingga pukesmas se-Batam. (she)

Pengadaan Komputer untuk UNBK Dicoret

BATAM KOTA (BP) - Pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak bisa dianggarkan di Anggaran Penetapan



F. DALIL HARAHAP/ BP

Ricky Indrakari

Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Selain merupakan kegiatan baru, pengadaan komputer UNBK juga pernah dicoret Dinas Pendidikan (Disdik) Batam pada pembahasan APBD murni 2018.

"Kami sudah berusaha anggarakan, tapi dicoret Disdik. APBD perubahan sudah tak bisa," kata anggota Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakari, Selasa (27/3).

Bahkan politisi PKS itu enggan berkomentar ketika

ditanya kemungkinan pengadaan diajukan pada 2019. Menurut dia, akan sia-sia saja sesuatu yang sudah masuk rencana kegiatan anggaran, tiba-tiba dicoret dengan alasan rasionalisasi. Padahal, UNBK ini bagian kegiatan yang diwajibkan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud).

"Sesuatu yang sudah diajukan kemudian ditarik lagi. Yang jelas kita tak ingin mengusulkan lagi," se-salnya.

Berbicara pembangunan pendidikan, menurutnya ada tiga pilar yakni pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing, serta peningkatan kualitas dan mutu guru. Akses pendidikan menyangkut penambahan bangunan sekolah. Sementara mutu dan daya saing inilah yang berhubungan dengan UNBK.

"Semuanya berpusat di tiga pilar itu. Jadi bukan gedung saja yang ditambah. SDM juga harus diciptakan," imbuhnya.

Menurutnya, seharusnya pengadaan komputer untuk UNBK sebesar Rp 5 miliar di APBD murni lalu diharapkan bisa menjawab keterbatasan sekolah negeri yang menggelar UNBK tahun ini. DPRD bera-sumsi dengan anggaran tersebut, setiap kecamatan ada satu sekolah yang memiliki peralatan komputer dan jaringan UNBK, sehingga bisa dipakai bersama.

"Artinya ketika UNBK bisa dipakai bergiliran, sehingga semua sekolah menengah pertama negeri bisa berbasis komputer," lanjutnya.

1.000 Papan Reklame Segera Dibongkar

Di Batam Maksimal 2.000 Papan Reklame

BATAM KOTA (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam segera menertibkan sedikitnya 1.000 papan reklame yang tersebar di sejumlah titik. Penertiban ini didasarkan hasil kajian Pemko Batam yang hanya membolehkan 2.000 papan reklame di Batam. Sementara saat ini tercatat ada 3.000.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengaku sudah melakukan sosialisasi rencana penertiban tersebut dalam pertemuan bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA), serta penyelenggara



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

PAPAN reklame hasil penertiban ditumpuk di samping Kantor Bersama Pemko Batam, Senin (13/3) lalu. Pemko Batam akan menertibkan sedikitnya 1.000 papan reklame yang tersebar di beberapa titik.

reklame.

"Iya, Batam maksimal 2.000 papan reklame, tidak boleh lebih. Jadi ada 1.000 yang akan

dibongkar," tegasnya, Selasa (27/3).

Ia juga menyebutkan, sekitar 1.000 reklame yang akan

dibongkar tersebut umumnya tidak sesuai ketentuan.

■ Baca **1.000**...Hal 13

Pengadaan Komputer untuk UNBK Dicoret

Sambungan dari hal 9

Namun demikian, Disdik sepertinya tidak melihat ke arah itu. Sehingga pelaksanaan UNBK tingkat SMP negeri tahun ini kembali minimal. Dari 45 SMP negeri, hanya tujuh sekolah saja yang dapat menggelar UNBK. "Ini kami sampaikan supaya sekolah tahu, bukan kami (DPRD) yang mencoret pengadaan komputer itu," tegas Riky.

Sementara itu, Kepala Dinas

Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin mengakui jika hanya ada tujuh sekolah yang menggelar UNBK tahun ini. Ketujuh sekolah tersebut adalah SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 11, SMPN 12, dan SMPN 26. "Khusus untuk SMPN 2 masih menumpang di sekolah lain, di SMAN 2," sebut Muslim.

Muslim mengatakan belum semua sekolah bisa melaksanakan UNBK karena terkendala infrastruktur ja-

ringan internet dan ketersediaan komputer. Sebab, syarat untuk melaksanakan UNBK mandiri adalah ketersediaan peralatan minimal 30 persen dari jumlah siswa. Pemerintah pusat sendiri menargetkan minimal 75 persen sekolah sudah menerapkan UNBK pada 2019 mendatang.

"Tentunya Batam juga akan berupaya untuk memenuhi target pusat ini," paparnya. (rng)

1.000 Papan Reklame Segera Dibongkar

Sambungan dari hal 9

Kebanyakan berdiri tanpa konstruksi yang kuat. Letaknya pun tidak sesuai dengan titik yang ditunjuk oleh pemerintah.

"Ada reklame yang sudah berbahaya. Ada juga yang mengganggu jalan," sebutnya.

Tahap awal penataan akan dilakukan mulai dari Flyover Simpang Jam sampai Batuampar. Keberadaan papan reklame di kawasan flyover ini, juga dikeluhkan penyelenggara reklame karena ada beberapa titik hanya dimiliki satu orang pengusaha. "Jadi tidak adil," katanya.

Namun pada dasarnya, lanjut Gustian, semua penyelenggara reklame sudah sepakat dan setuju untuk ikut menata Kota Batam. "Nanti kita akan bagi zona, termasuk jumlah reklame di satu zona," ujarnya.

Menurut Gustian, semua penyelenggara reklame sudah sepakat untuk ikut ketentuan. Antara lain harus sesuai dengan Perwako (Peraturan Wali Kota), LED dan memiliki solar cell, sehingga malam hari bisa membantu penerangan jalan.

Beberapa waktu lalu, beberapa papan reklame sudah dibongkar karena menghalangi

aktivitas lalu lintas dan tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti papan reklame di Simpang Nagoya atau Martabak Har, serta dekat bundaran Nongsa.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Batam Tumbur M Sihaloho mengatakan, saat ini memang banyak reklame atau baliho yang tidak teratur, sehingga memang harus ditata. Tetapi ia berpesan dalam penataan atau penertiban harus objektif.

"Di sini jangan ada kepentingan pribadi. Dan penertiban harus adil, jangan ada faktor *like and dislike*. Harus objektif dalam bertindak," jelasnya. (ian)

Investigasi Pencemaran Laut Nihil

BATAM KOTA (BP) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam hingga kini belum mengetahui asal-usul limbah minyak (*oil spil*) yang mencemari sejumlah titik pantai di Nongsa. Bahkan, kasus serupa yang terjadi pada 2017 lalu juga belum terungkap.

"Yang (pencemaran) 2017 saja sampai sekarang belum diketahui, apalagi yang kemarin sore (terbaru)," ucap Kepala DLH Batam Herman Rozie, kemarin.

Untuk kasus terbaru ini, DLH Batam masih menunggu penyelidikan yang sedang dilakukan.

Untuk diketahui, DLH Batam mengaku telah mengambil sampel limbah tersebut dan juga menyampaikan informasi pencemaran hingga ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

"Belum (dapat informasi), kami masih menunggu. Sekarang, angkatan laut kita juga sudah jalan (mencari penyebab pencemaran)," kata dia.

Menurutnya, kasus ini terjadi karena fenomena alam. Limbah yang diduga dibuang di perairan luar Indonesia terseret arus hingga ke perairan Batam karena terbawa angin utara.

"Sekarang siapa yang kita mau tuduh. Misal di sungai orang tebar putas di hulu, tapi yang mati ikannya di hilir. Sama kayak ini, bisa jadi limbah dibuang di Malaysia atau Singapura, tapi kan belum jelas," imbuhnya.

Ia menyampaikan, terkait pencemaran limbah di Batam, pada 3-6 April 2018 menda-



Sekarang siapa yang kita mau tuduh. Misal di sungai orang tebar putas di hulu, tapi yang mati ikannya di hilir. Sama kayak ini, bisa jadi limbah di buang di Malaysia atau Singapura, tapi kan belum jelas,

HERMAN ROZIE
Kepala DLH Batam

tang akan ada audit lingkungan dan investigasi limbah laut di Batam. Kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Koordinator (Kemkenko) Kemaritiman Republik Indonesia.

"Tim audit ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, DLH Batam, DLH Karimun dan DLH Kepri," papar Herman.

Ia merinci, ada delapan perusahaan yang akan diaudit, enam di antaranya perusahaan Batam dan dua lainnya merupakan perusahaan dari Kabupaten Karimun.

"Berdasarkan surat yang kami terima, diadakan di Batam, karena Batam banyak perusahaan yang akan diaudit," pungkasnya. (adi)



LIMBAH minyak yang mencemari pantai di Nongsa Village Resort.

Promo WIKA SWH
HEMANG BANYAK

wika wh
Solar WATER HEATER

The Water Heater Specialist

DAPATKAN CASHBACK
Rp 700 Ribu
SETIAP PEMBELIAN
TYPE SR150L1 & SR300L2
Periode 05 - 28 Maret 2018

TOP BRAND
POPULAR BRAND

PRODUK BERTERAKAN

Distributor SWH WIKA untuk Batam:
PT. SARANA KARYASINDO MANDIRI
Komp. Wijaya Kusuma, Blok H No. 3-4, Jln. Imam Bonjol, Nagoya Batam
Tlp. 0778 - 458821, 459756 Email : skm_btm@yahoo.com

Lima Investor Masuk Batam

Triwulan Pertama 2018

BATAM KOTA (BP) - Sepanjang triwulan pertama tahun 2018 ini, lima investor masuk ke Batam melalui program Izin Investasi 3 Jam (I23J). Total investasi mencapai Rp 300 miliar, dan mayoritas investasi bergerak dalam bidang industri manufaktur dan perdagangan.

"Data ini terhitung sejak Januari hingga 22 Maret lalu," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam Adie Soegiharto, Selasa (27/3).

Dari lima perusahaan tersebut, dua di antaranya adalah PT Hong Sheng Plastic Industry, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang plastik. Kemudian PT Panca Costa Investmen, perusahaan kedua ini akan membangun industri beton siap pakai dengan nilai investasi sebesar Rp 50 miliar.

Adie menjelaskan dari kelima perusahaan itu ada juga beberapa perusahaan yang melakukan perluasan di Batam. Ada juga perusahaan yang masih terbilang baru dan secara mayoritas bergerak dalam bidang manufaktur dan perda-

gangan. "Perusahaan yang sudah eksis melakukan ekspansi berkembang, ada juga perusahaan yang baru masuk. Tren masih manufaktur dan perdagangan," jelasnya.

Adie menambahkan investasi pada triwulan pertama tahun 2018 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan investasi pada tahun 2017 pada periode yang sama. Namun ia belum bisa menyampaikan secara konkrit karena belum merekapitulasi secara keseluruhan.

"Kalau lihat trennya dari 2017, tren pada 2018 lebih meningkat. Karena ada beberapa perusahaan yang melakukan ekspansi. Saya belum rekap, nanti akan diagendakan terkait data realisasi dan rencana investasi," terangnya.

Kendati demikian, PTSP BP Batam terus memberikan kemudahan perizinan kepada para investor, bahkan PTSP BP Batam sudah dinyatakan lulus sertifikasi ISO 9001 2015 yang dikeluarkan UKAS Management System dari Inggris. ISO 9001 2015 adalah sebuah standar internasional untuk penilaian pelayanan yang

dijalankan sebuah instansi.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Batam bisa mencapai target tujuh persen melalui berbagai upaya untuk mendorong investasi, dengan menggerakkan semua sektor mulai industri, galangan kapal, perdagangan, dan pariwisata

"Untuk mencapai ekonomi bisa tujuh persen, investasi adalah utama. Jadi kita ingin menjaga investasi yang ada di Batam jangan sampai keluar dan jangan sampai tutup," kata Lukita beberapa waktu lalu.

Lukita mengatakan upaya menjaga investasi itu tidak hanya dilakukan kepada investasi lama, namun juga investasi baru yang dibutuhkan untuk mendorong kinerja perekonomian di kawasan Batam yang saat ini sedang dilanda kelesuan. "Caranya tentu kita harus memperbaiki pelayanan-pelayanan, memberikan kemudahan serta membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan," pungkasnya. (leo)

Penerapan Pajak Baru Bisa Ditunda

BATAM KOTA (BP) - Wacana penundaan penerapan tarif baru pajak daerah terus bergulir. Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersedia menunda jika ada kata sepakat atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam.

"Jika sesuai aturan yang berlaku, kami siap saja (menunda tarif pajak daerah yang baru)," kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam Raja Azmansyah, Selasa (27/3).

Raja mengaku sebelumnya telah melayangkan surat ke DPRD Batam terkait hasil audiensi Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) Batam. Dalam audiensi tersebut, Aspi minta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak tersebut.

Sebelumnya, Aspi bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)



F. CECEP MULYANA/OP
Raja Azmansyah

juga melakukan audiensi ke DPRD Batam, Senin (26/3). Permintaannya sama, minta penundaan penerapan tarif pajak baru. "Nanti kami (Pemko dan DPRD) sama-sama akan mendiskusikannya," ujarnya.

Dia menuturkan, pertemuan antara Pemko dan DPRD Batam dijadwalkan pada Senin (2/4) mendatang. "Nanti dalam

pertemuan tersebut kita akan bicara langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, apakah memungkinkan membahas penundaan tarif baru pajak daerah ini atau tidak,"

jelasnya.

Sementara itu, penundaan tarif pajak akan mempengaruhi capaian Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun ini. Sebab, untuk diketahui PAD 2018

sebesar Rp 1,35 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2,627 triliun.

"Kalau ditunda sudah pasti target (PAD) tidak tercapai,

karena target tahun ini sudah termasuk hitungan kenaikan tersebut (tarif baru pajak daerah). Kami hitung kenaikan itu bagian dari potensi," terangnya. (adi)

Peserta BPJS Harus Dapat Pelayanan Sama Bisa Langsung ke RS Tipe C dengan Syarat